

KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN NORWEGIA DALAM KERANGKA REDUCTING EMISSION FROM DEFORESTATION AND DEGRADATION (REDD) TAHUN 2010

Oleh:

Iqbal Sani

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Email: iqbangbeje@gmail.com

Bibliografi : 3 Jurnal, 7 Buku, 2 Skripsi, 21 Website, 8 Dokumen

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293Telp. (0761) 63277, 23430

Abstact

Penelitian ini akan menjelaskan kepentingan Indonesia dalam kerjasama lingkungan hidup dalam kerangka Reducting Emission From Deforestation and Degradation dengan Norwegia. Kerjasama yang tertuang dalam surat niat Indonesia terhadap Norwegia yang ditandatangani pada tahun 2010 merupakan salah satu wujud nyata kedua negara dalam menyelamatkan dunia dari kerusakan lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup saat ini bukanlah permasalahan yang dianggap mudah dan sangat mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena isu ini berhubungan langsung dengan kehidupan manusia di dunia. Ketika permasalahan lingkungan hidup tidak ditanggapi dengan lebih serius, maka miliaran manusia akan kehilangan tempat tinggalnya akibat dari salah satu permasalahan lingkungan hidup yaitu emisi gas karbondioksida yang dihasilkan banyak negara-negara khususnya negara industri.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dimana data-data yang didapat dalam penelitian ini berasal dari buku dan website yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Penelitian ini akan dikaji menggunakan perspektif liberalisme yang akan mengkaji mengenai kerjasama antara negara Indonesia dan Norwegia dan akan dibantu dengan teori pilihan rasional dan kepentingan nasional untuk menganalisa kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan Norwegia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Norwegia dipilih oleh Indonesia sebagai rekan kerjasama Indonesia dalam menjaga hutan Indonesia karena Norwegia merupakan negara kaya yang memiliki komitmen kuat untuk melindungi lingkungan hidup yang dibuktikan dengan kebijakan Norwegia yang memberikan dana hibah kepada negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia.

Kata kunci: REDD+, Deforestasi, Degradasi, Hutan

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam kebijakan kerjasamanya dengan Norwegia dalam bidang lingkungan melalui kerangka Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). Perkembangan yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat mengharuskan setiap negara ikut serta mengikuti perkembangan tersebut, bahkan tidak hanya negara, ilmu pengetahuan pun ikut serta dalam perkembangan dunia yang sangat cepat tersebut.

Hubungan internasional adalah salah satu cabang ilmu politik yang dinamis yang ikut serta mengalami perkembangan dengan sejalannya waktu. Kondisi dunia yang saat ini terfokus dalam permasalahan yang tidak hanya pada fokus konflik dan perang, kini juga berfokus pada permasalahan ekonomi bahkan lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang saat ini marak dibahas dalam segala kajian ilmu dikarenakan akibat dari banyaknya kegiatan manusia yang tidak memperhitungkan masalah kelestarian lingkungan hidup sehingga terjadilah permasalahan pemanasan global sebagai akibat dari perubahan iklim.

Perubahan Iklim merupakan salah satu fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan bahan bakar fosil serta kegiatan alih guna lahan yang mengakibatkan hutan sebagai paru-paru dunia semakin berkurang. Manfaat hutan diantaranya sebagai pengatur tata air, sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbondioksida. Penyerapan karbondioksida sendiri terjadi didasarkan atas proses kimiawi dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap gas karbondioksida dari atmosfer dan air dari

tanah yang akhirnya menghasilkan oksigen dan karbohidrat.¹

Ketika hutan ditebang dan dirusak secara berlebihan, biomassa yang tersimpan di dalam pohon akan membusuk atau terurai dan menghasilkan gas karbondioksida, Akibatnya adalah kehilangan fungsi penyerapan karbondioksida yang secara terus menerus menyerap karbondioksida yang ada di atmosfer. Sehingga mengakibatkan peningkatkan GRK yang pada akhirnya mengakibatkan suhu permukaan bumi akan semakin memanas, panas inilah yang kita kenal sebagai pemanasan global (Global Warming) sebagai pemicu perubahan iklim.²

Fenomena pemanasan global (global warming) salah satunya disebabkan karena laju perusakan hutan yang sangat cepat. Gejala tersebut menimbulkan efek rumah kaca yang menjadi penyebab utama global warming.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Polusi karbon di Indonesia sudah disejajarkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China hal ini disebabkan penebangan hutan di Indonesia termasuk yang cukup parah selain Pantai Gading, Gabon dan Filipina. Selain itu jumlah pelepasan karbon di Indonesia

¹ Cadangan Karbon Pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia terdapat dalam http://www.reddindonesia.org/images/stories/publikasi/cadangan_carbon_15_Januari11.pdf 5 Juni 2015 pukul 19.02 WIB.

² Protokol Kyoto: solusi terhadap pemanasan global, terdapat dalam http://www.chem-is-try.org/kategori/artikel_kimia 5 Juni 2015 pukul 19.02 WIB.

sudah masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Faktor utama yang menyebabkan besarnya pelepasan karbon di Indonesia adalah kerusakan hutan lahan gambut. Sebagai contoh, Kalimantan tengah dengan luas lahan gambut sekitar 3 juta ha diperkirakan dapat menyimpan karbon setara 22 gigaton karbondioksida, bila lahan gambut itu dikonversi menjadi lahan pertanian dan lain sebagainya potensi lepasnya karbondioksida ke udara sangat besar.

Kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini membawa sebagian besar negara yang memiliki hutan tropis di dunia merasa perlu melakukan upaya untuk menghentikan pemanasan global sebagai akibat dari perubahan iklim tersebut. Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia, mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD). Skema ini mulai digulirkan pada Conference of the Parties (COP) Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu.

Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia. Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Republic Congo, Brazil, Cameroon, Republic Demokratio Congo, Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelas negara ini memiliki 50 persen hutan tropis dunia.

Upaya yang digulirkan oleh beberapa negara yang memiliki hutan tropis di dunia ini ternyata disambut baik oleh dunia internasional. salah satu negara yang menyambut baik upaya ini adalah negara Norwegia. Norwegia adalah salah satu negara yang berada di benua Eropa dan termasuk negara yang menjadi negara maju dan tergolong negara Annex 1 menurut Protokol Kyoto yang merupakan rezim

internasional dibidang lingkungan internasional.

Politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain, misalnya, letak geografis, faktor sumber daya alam yang dimiliki dan nilai-nilai strategis. Kesemua nilai strategis tersebut tentu mempengaruhi sikap, cara pandang, serta cara bangsa ini dalam memposisikan diri di dalam pergaulan antar-bangsa. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait dengan isu lingkungan adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, dalam hal ini negara maju seperti Norwegia yang menjadi mitra untuk menangani permasalahan lingkungan dan bahkan membuat suatu perjanjian, yang merupakan perjanjian internasional lingkungan, di mana perjanjian ini mengikat secara hukum dan ditandatangani antara semua negara sebagai suatu perjanjian yang menanggapi permasalahan lingkungan.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Norwegia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Selain itu, Kedua negara juga mengembangkan kemitraan dalam isu-isu internasional penting, antara lain dalam:

- Seven Nations Initiative (7NI) di bidang nuclear non-prolifiration,
- upaya pencapaian Millenium Development Goals 4 dan 5 (mencegah kematian anak dan ibu melahirkan) yang dikemas dalam keanggotaan "Sherpa Group",
- menjadi co-host dalam inter-media dialogue,
- serta kemitraan dalam inisiatif health and foreign policy.

Hubungan baik kedua negara juga tercermin dari bantuan Norwegia untuk bidang kehutanan dengan menyampaikan pledge dana sebesar Nok 3 miliar (USD 500 juta) setahun bagi upaya untuk mengurangi

emisi gas dan penggundulan hutan-hutan di negara berkembang dalam pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali bulan Desember 2007. Sebagai tindak lanjut dari pledge tersebut, Special Envoy for the Norwegian Climate and Forest Initiative, Ambassador Hans Brattskar berkunjung ke Indonesia pada tanggal 16-23 Oktober 2008 untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama Indonesia-Norwegia di bidang deforestasi.

Norwegia yang juga mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar, seperti Indonesia, Brasil, dan Republik Kongo, untuk menurunkan laju emisinya. Di antara komunitas negara maju, komitmen Norwegia paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30 persen dari tahun 1990. Norwegia yang merupakan salah satu negara annex 1 yang terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai dari sumber daya energi yang ada saat ini dan meningkatkan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem energi yang baru dan ramah lingkungan, termasuk metode dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi. Kebijakan energi negara ini memiliki contoh positif bagi negara lain, Norwegia merupakan negara yang terus berinvestasi dalam mengembangkan langkah-langkah baru untuk mencapai tujuan akhir menjadi negara bebas karbon pada tahun 2050.

Namun, Norwegia selain melakukan sendiri pengurangan emisi GRK yang dihasilkan di negaranya, Norwegia juga menawarkan kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan proyek REDD+ Kerjasama Konservasi Hutan Indo-Norwegia dlm kerangka REDD+ Thn 2010 di Indonesia, dimana hal ini menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara yang memiliki kepedulian cukup besar untuk mengurangi dampak perubahan iklim secara global.

Dengan berbagai permasalahan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia telah Menarik perhatian Norwegia untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan proyek REDD+. REDD+ adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dengan cara melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian hutan sebagai fungsi penyerapan karbon, dan bersifat sukarela (voluntary) serta menghormati kedaulatan negara (sovereignty). REDD+ juga memiliki sedikit perbedaan dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan.

Dalam kerjasama konservasi antara Indonesia dengan Norwegia dalam kerangka REDD+ ini termasuk dalam kerjasama fungsional, dimana kerjasama yang terjalin untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang perlu dicapai melalui kerjasama fungsional ini, kerjasama ini memerlukan adanya power dalam memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masing-masing pihak dan kedua belah pihak saling melengkapi dan mendukung, namun jika salah satu pihak tidak dapat melakukan fungsinya maka kerjasama tersebut tidak dapat berjalan.

Sehingga, pada tanggal 26 Mei 2010 di tandatangani nota kesepahaman (Letter Of Intent) kerjasama pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia. Untuk memperlancar proses kerjasama tersebut, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) persiapan kelembagaan REDD+ dimana badan ini akan mengkoordinir proses pengembangan

strategi nasional REDD+ di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia dan Norwegia sepakat menetapkan Kalimantan Tengah sebagai contoh proyek REDD+ dan mendirikan kantor REDD+ di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.³

Kerangka Teori

Penulis menggunakan tingkat analisa negara-bangsa, dimana negara-bangsa ini dipengaruhi karakteristik internal dari sistem politik, baik keadaan ekonomi atau struktur sosial. Penggunaan tingkat analisa ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*).

Penelitian ini akan dicoba dikaji dengan menggunakan perspektif liberalisme. Liberalisme sebagai sebuah "isme" merupakan sebuah perspektif politik, ekonomi, sosial, dan suatu filsafat atau ideologi yang mencakup tentang semua aspek kehidupan manusia. Ada beberapa poin yang terdapat dalam perspektif liberalisme yaitu: rasionalitas, yang merupakan ciri universal manusia. Secara rasional, individu akan mengejar kepentingan sendiri dengan membentuk keselarasan kepentingan masing-masing individu. Kerjasama merupakan ciri utama dalam sebuah hubungan manusia termasuk hubungan internasional, dalam hubungan internasional diperlukan pemerintah sebagai media selanjutnya yaitu kebebasan individu

yang mana merupakan sebuah kepentingan politik yang utama.⁴

Mengkaji penelitian ini dengan lebih dalam, maka penulis menggunakan teori yang biasa digunakan dalam menganalisa kepentingan negara dalam menjalankan politik internasionalnya. Teori yang digunakan untuk mempertajam analisa dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional.⁵

Tiga poin yang dijelaskan oleh Waltz mengenai teori pilihan rasional. Pertama, teori pilihan rasional bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan). Dapat dikatakan Waltz menambahkan mengenai aktor kesatuan (negara) pada aktor teori pilihan rasional, yang sebelumnya dijelaskan oleh Latsis yaitu individu.

Kedua, Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya.

Ketiga, teori pilihan rasional menspesifikasikan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, misalkan aktor memiliki beberapa pilihan (artinya peneliti dapat membentuk urutan peringkat dari preferensi untuk hasil yang berbeda). Selain itu, pilihan harus bersifat transitif (jika pilihan A lebih dinilai penting dibanding dengan pilihan B dan C, maka aktor akan memilih A). Waltz pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat

³ Norwegia Gelontorkan Puluhan Juta Dollar untuk 'Toilet Karbon'. Terdapat dalam <http://erabaru.net/nasional/50jakarta/16572-norwegia-gelontorkan-puluhan-juta-dolar-untuk-toilet-karbon> 5 Juni 2015 pukul 19.02 WIB.

⁴ Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. Hal 98-101.

⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Belajajar, 2009), hlm. 297

untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana manusia (atau negara) membuat keputusan.

Perspektif, teori dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini mengarah pada satu hal yaitu kepentingan dibalik kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Norwegia. Menurut teori yang digunakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara dianalogikan sebagai seorang manusia yang memiliki rasionalitas dalam memilih pilihannya. Pilihan yang dipilih diharapkan mampu menjadi pilihan terbaik yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia dibandingkan kerugian atau biaya yang harus dikeluarkan oleh Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kerjasama pengurangan emisi gas karbondioksida yang dilakukan oleh Indonesia dengan Norwegia dalam hal ini dinilai oleh Indonesia sebagai kerjasama yang menguntungkan yang tidak saja menguntungkan Norwegia, namun juga Indonesia yang dikarenakan setelah kerjasama ini, Indonesia mengharapkan keuntungan besar dari Norwegia sebagai negara industri maju yang nantinya akan membantu Indonesia dalam hal pelestarian hutan dan lingkungan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan mengkaji mengenai alasan Indonesia dalam kerjasama lingkungan hidup dengan Norwegia yang tertuang dalam *Letter of Intent* yang ditanda tangani oleh kedua negara pada 26 Mei 2010 yang lalu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kondisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia

Deforestasi merupakan proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh

kebakaran hutan, baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Deforestasi mengancam kehidupan umat manusia dan spesies mahluk hidup lainnya. Sumbangan terbesar dari perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan oleh deforestasi.⁶ Sedangkan degradasi merupakan perubahan didalam hutan yang berdampak negatif terhadap struktur atau fungsi tegakan atau lahan hutan sehingga menurunkan kemampuan hutan dalam menyediakan produk hutan. Dalam konteks Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), degradasi dapat diartikan sebagai penurunan stok karbon (Carbon stock degradation) hutan.

Hutan memiliki peran penting dalam menentukan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, setiap tahun hutan menyerap 2,6 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, sekitar sepertiga dari karbon dioksida dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil. Ketika hutan ditebang akan berdampak besar. Deforestasi menyumbang hampir 20% dari seluruh emisi gas rumah kaca, lebih dari sektor transportasi di dunia.⁷

Deforestasi dapat terjadi karena konversi lahan untuk pemukiman, infrastruktur, dan penebangan hasil kayu untuk industri. Selain itu juga terjadi konversi lahan menjadi perkebunan, pertanian, peternakan dan pertambangan. Beberapa faktor yang menyebabkan deforestasi yaitu:⁸

1. Konversi Pertanian.
Sebagaimana populasi manusia

⁶ Risnandar., 2015. Deforestasi. Diakses dari < <https://jurnalbumi.com/deforestasi/> > pada tanggal 01 September 2015

⁷ Forests and Climate Change. Cifor. Diakses dari < <http://www.cifor.org/forests-and-climate-change/> > pada tanggal 01 September 2015

⁸ Deforestation Threats. World Wild Life. Diakses dari < <http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation> > pada tanggal 02 September 2015

yang terus berkembang, ada kebutuhan yang jelas untuk pasokan bahan pangan yang semakin besar. Selain itu, produk pertanian seperti kedelai dan minyak sawit yang semakin meningkat. Meningkatnya permintaan telah menciptakan insentif untuk mengkonversi hutan untuk lahan pertanian dan padang rumput. Setelah hutan hilang untuk pertanian, biasanya akan hilang selamanya, bersama dengan banyak tanaman dan hewan yang pernah tinggal disana.

2. Penebangan Liar. Pembalakan liar terjadi diseluruh dunia dan mengancam hutan dunia, termasuk hutan hujan di Amazon, Kongo, Indonesia, dan hutan di Timur Rusia. Penebangan liar juga menekan harga kayu diseluruh dunia, merugikan perusahaan yang taat hukum, dan merampas pendapatan pemerintah yang biasanya dihasilkan dari pajak dan bea cukai.
3. Kebakaran Hutan. Setiap tahun jutaan hektar hutan diseluruh dunia hancur atau rusak akibat kebakaran. Kebakaran ini tidak hanya mengubah struktur dan komposisi hutan, tetapi juga dapat membuka hutan untuk spesies yang invasif, mengancam keanekaragaman hayati, mengubah siklus air dan kesuburan tanah, serta menghancurkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

4. Penggunaan Kayu Bakar. Penggunaan kayu untuk bahan bakar masih signifikan sebagai salah satu pendorong deforestasi. Setengah dari praktek penebangan liar didorong oleh konsumsi kayu bakar.

Berikut adalah gambaran umum mengenai laju deforestasi hutan yang terjadi di Indonesia yang diambil sejak tahun 1950 hingga 2007 yang diteliti dan diolah oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI:

Tabel 1.
Laju Deforestasi Hutan di Indonesia
Periode 1950-2007.

Tahun	Luas Hutan	Luas Perkembangan Kerusakan Hutan
1950-1985	162 juta ha	32,9 juta ha atau 942,857 ha per tahun
1985-1993	143 juta ha	45,6 juta ha atau 5,7 juta ha per tahun
1993-1997	120 juta ha	22 juta ha atau 1,7 juta ha per tahun
1998-2002	100 juta ha	13,6 juta ha atau 3,4 juta ha per tahun
2002-2007	96 juta ha	2,72 juta ha per tahun

Sumber : Deforestasi dan *Illegal Logging*, Lembar Info WALHI, 2007.

Di Indonesia, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Dari 2.250.000 metrik ton, sektor kehutanan dan lahan gambut menyumbang total 84 persen dari emisi gas rumah kaca.⁹

Dalam laporan terakhir, angka deforestasi rata-rata tahunan periode 2006-2009 di Indonesia mencapai 0,83 juta hektare per tahun. Deforestasi ini terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan. Deforestasi terbesar terjadi di dalam kawasan hutan (73,4 persen),

⁹ Dokumen Pemantauan Hutan Indonesia Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

sedangkan di luar kawasan hutan, deforestasi terjadi sebesar 26,6 persen. Sementara itu, angka degradasi hutan Indonesia pada periode yang sama mencapai 446,9 ribu hektare per tahun. Degradasi di dalam kawasan hutan mencapai 97 persen (433,7 ribu hektare per tahun), dan sisanya di luar kawasan hutan (13,1 ribu hektare per tahun).¹⁰

Letter of Intent Indonesia Kepada Norwegia

Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan komitmen yang besar untuk terlibat dalam penyelamatan dunia dari efek rumah kaca salah satu yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama lingkungan dengan negara maju yang dilakukan oleh Indonesia dengan Norwegia salah satu negara maju yang memiliki komitmen besar dalam menyelamatkan dunia dari perubahan iklim. Letter of Intent adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh Indonesia untuk mewujudkan impian tersebut.

Surat niat Indonesia mengenai pengurangan emisi gas karbondioksida adalah langkah yang diambil oleh Indonesia disela-sela penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi mengenai perubahan iklim dan kehutanan yang dilakukan di Oslo Norwegia pada tahun 2010 yang lalu. Pada konferensi Oslo untuk perubahan iklim dan kehutanan tahun 2010 yang lalu, Presiden Republik Indonesia hadir sebagai *co-chairs* bersama dengan Perdana Menteri Norwegia saat itu.¹¹

Surat niat Indonesia untuk Norwegia adalah hasil dari perundingan bilateral antara Indonesia dan Norwegia dalam konferensi tersebut. Kedua negara ini melalui Letter of Intent ini berkomitmen untuk melakukan

kerjasama dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan yang selama ini terjadi khususnya lahan gambut. Kegiatan kerjasama Indonesia dan Norwegia ini dilakukan dalam kerangka Reducing Emission from Deforestation and Degradation atau yang biasa disingkat dengan REDD+.

Melalui kerjasama yang tertuang dalam surat niat Indonesia kepada pemerintah Norwegia, Susilo Bambang Yudhoyono sangat mengharapkan keberhasilan kerjasama ini yang nantinya dinilai akan sangat bermanfaat dan berguna tidak hanya bagi kedua negara yang menjalankan kerjasama, namun juga bagi dunia dalam upayanya mengurangi emisi gas rumah kaca di dunia. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa kerjasama dengan Norwegia ini harus berhasil dan tidak boleh gagal karena jika sampai gagal akan merugikan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kepentingan nasional dalam kegiatan tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai langkah nyata yang diambil oleh Indonesia dalam upayanya menindaklanjuti komitmen yang telah diambil dan melalui surat niat Indonesia untuk Norwegia dalam kerjasama REDD+ ini diharapkan dapat menjadi model dan contoh bagi setiap negara yang ingin mengurangi emisi gas rumah kacanya khususnya negara-negara yang tergolong negara Annex 1 dalam protokol Kyoto.

Alasan Norwegia Menerima Letter of Intent Dari Indonesia

Keseriusan pemerintah Norwegia dalam turut andil mengurangi emisi gas rumah kaca terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Norwegia. Sejak tahun 1980 an, pemerintah Norwegia menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu landasan mereka dalam membuat suatu kebijakan yang diharapkan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Presiden: LoI Pelestarian Hutan dengan Norwegia Harus Berhasil*. Diakses melalui <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=7153>. Diakses pada 2 September 2015.

dapat menjadi kebijakan yang mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan negara ini, bahkan pada tahun 1991, pemerintah Norwegia mengeluarkan kebijakan mengenai pajak CO₂ yang diharapkan menjadi kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan penambahan konsentrasi gas karbondioksida di udara.

Komitmen pemerintah Norwegia tidak hanya diranah nasional negaranya, namun Norwegia juga terlibat aktif dalam forum internasional mengenai perubahan iklim. Pemerintah Norwegia meratifikasi konvensi mengenai perubahan iklim dan juga protokol Kyoto yang merupakan rezim lingkungan internasional yang fokus pada penyelamatan dunia dari perubahan iklim yang terjadi. Sebagai negara yang tergolong dalam negara Annex 1, pemerintah Norwegia diharuskan mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 5,2% dari emisi gas rumah kacanya pada tahun 1990. Tercatat pada tahun 2003 jumlah emisi gas rumah kaca Norwegia sebesar 54,8 ton CO₂. Angka ini naik sebesar 9% sejak tahun 1990 hingga 2003.

Norwegia berkomitmen untuk menjaga emisi Gas Rumah Kaca nya tidak melebihi tingkat emisi pada tahun 1990 lebih dari 1% pada periode 2008-2012. Namun Norwegia dan sebagian besar negara-negara lain yang termasuk ke dalam negara Annex 1 merasa kesulitan untuk melakukan hal tersebut dikarenakan dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga 5.2% itu berarti negara-negara tersebut diharuskan untuk mengurangi emisi 6 jenis Gas Rumah Kaca, salah satunya CO₂ yang berarti mereka harus mengurangi aktivitas industrial di dalam negara mereka masing-masing.

Terdapat dua alasan yang menjadi latar belakang diterimanya proposal REDD dari pemerintah Indonesia oleh pemerintah Norwegia. Pertama, Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga didunia dengan

didalamnya terdapat berbagai aneka kekayaan hayati berperan sebagai paru paru dunia yang berperan sebagai penyedia strategis kebutuhan udara bersih dunia. Kedua, skema dan mekanisme pembiayaan dalam REDD yang diajukan Indonesia dinilai sesuai oleh pemerintah Norwegia yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang karbon sebagai kompensasi dari kegiatan industrinya. Berdasarkan alasan tersebut maka Norwegia menyetujui untuk menerima proposal REDD dari Indonesia.

Implementasi REDD+ Di Indonesia

Saat ini, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia dalam kerjasama REDD+ sudah memasuki tahun kelima sejak ditandatanganinya kerjasama tersebut oleh kedua negara. Banyak yang sudah dilakukan oleh kedua negara untuk menyukseskan kerjasama kedua negara ini agar menjadi salah satu model kerjasama yang dapat dilakukan oleh setiap negara lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kerjasama Indonesia dan Norwegia yang tertuang dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh kedua negara ini akan dilakukan dalam tiga fase. Ketiga fase kerjasama Indonesia dan Norwegia ini telah tertuang semuanya dalam perjanjian tersebut. Ketiga fase kerjasama antara Indonesia dan Norwegia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Fase Kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam *Letter of Intent (LOI)*

Fase	Program
Fase I (Persiapan)	1. Pembentukan Rencana Aksi Nasional (Strategi Nasional REDD di Indonesia) 2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) REDD untuk mengkoordinasika

	<p>n usaha-usaha pengembangan dan implementasi REDD</p> <p>3. Merancang dan menetapkan instrumen pengelolaan dana hibah</p> <p>4. Menetapkan Propinsi Percontohan</p>
Fase II (Transformasi)	<p>1. Mekanisme MRV (<i>Measurement, Reporting and Verification</i>)</p> <p>2. Penerbitan Moratorium</p> <p>3. Membangun <i>Database</i> Hutan Rusak Untuk Pembangunan Ekonomi dan Investasi</p> <p>4. Penegakkan Hukum Pemberantasan <i>Illegal Logging</i></p> <p>5. Penyelesaian Konflik Lahan</p>
Fase III (Pengurangan Emisi Berdasarkan Kontribusi yang Diverifikasi)	<p>1. Implementasi dari mekanisme pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi</p>

Sumber:

<http://www.satgasreddplus.org/download/180612.Strategi.Nasional.REDD+.pdf>

Analisa Kepentingan Indonesia Melalui LOI dengan Norwegia

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka REDD yang mana ketiga tujuan ini merupakan tujuan yang berorientasi pada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Ketiga tujuan utama Indonesia dalam kerangka REDD adalah sebagai berikut:¹²

- Mengintegrasikan konsep ekonomi pedesaan yang lebih berimbang sebagai dasar untuk melaksanakan pengurangan emisi ke dalam pembentukan Badan REDD+ yang baru serta sistem pelaporan dan verifikasi, dan lembaga-lembaga pemerintah terkait.
- Terwujudnya perluasan dan penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber daya hutan agar dapat memperkuat ekonomi pedesaan beremisi rendah.
- Diadopsinya praktik yang baik berdasarkan kontrakkontrak yang ditegakan bersama oleh masyarakat dan pelaku sektor swasta yang terkemuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai penelitian ini maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dalam penelitian penulis sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia melalui surat niat Indonesia untuk Norwegia adalah produk dari kebijakan Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas karbondioksida Indonesia dimana Norwegia

¹² Aliansi untuk Iklim dan Pemanfaatan Lahan: Ikhtisar Singkat. *Climate and Land Use Alliance*. Pdf.

berperan sebagai donatur yang akan memberikan dana hibah bagi Indonesia untuk melindungi hutan Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan. Melalui LOI Indonesia dan Norwegia, pihak Indonesia akan mendapatkan dana hibah US\$ 1 Miliar untuk dana penyelamatan hutan Indonesia.

2. LOI Indonesia dan Norwegia dibagi dalam tiga tahap yaitu fase persiapan, yang kedua fase transformasi dimana pada kedua fase ini, Indonesia akan mendapat dana 200 juta Dollar untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk program REDD+ yang dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Dana 800 juta Dollar nantinya akan diberikan pada fase ketiga.
3. Penulis menganalisa ada 2 tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui kerjasama Indonesia dengan Norwegia yaitu Indonesia menginginkan dana hibah yang disediakan oleh Norwegia sebesar 1 Miliar Dollar Amerika Serikat untuk menjaga lingkungan khususnya hutan yang ada di Indonesia. Keinginan Indonesia ini menurut penulis karena Indonesia tidak memiliki dana yang cukup jika niatnya untuk mengurangi emisi karbondioksida jika hanya mengandalkan dana Indonesia, perlu adanya suntikan dana dari negara kaya yang juga memiliki komitmen yang sama dengan Indonesia untuk melakukan kerjasama tersebut agar berjalan dengan lancar.
4. Indonesia juga menurut penulis mengincar pencitraan di dunia internasional sebagai negara berkembang yang memiliki niatan besar yang dibuktikan dengan pengurangan emisi gas karbondioksida. Keberhasilan kerjasama ini yang diharapkan oleh

kedua negara nantinya akan menaikkan posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia akan dinilai sebagai negara yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca setelah kerjasama dengan Norwegia. Hal ini nantinya akan menjadi suatu kemudahan untuk Indonesia jika Indonesia ingin melakukan kerjasama dengan negara lainnya di luar negara Norwegia dalam hal yang sama dan akan meningkatkan kerjasama Indonesia dan negara-negara lain di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

CIFOR (Center For International Forestry Research), 2010, Pedoman Cifor Tentang Hutan, Perubahan Iklim Dan REDD, Bogor: CIFOR.

Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar. 2014. Jakarta: Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+.

Waltz, S., M., 1999. "Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies," MIT Press Journals, Spring. Terdapat dalam <http://mitpress.mit.edu/journals> diakses 7 juni 2015

Buku

Columbis, T., A., & Wolf, J., E., 1999. Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, Bandung: PT. Putra A. Bardin.

Hakim, R., 2007. Prinsip Dasar Kebijakan bagi Protokol Kyoto, Edisi Pertama, Jakarta; Bumi Aksara.

Jackson, R., & Sorensen, G. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Masoed, M., 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta; LP3ES.

Perwita, A.A. B. Dan Yani, Y.M., 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sitepu, A. 2003. Dasar-Dasar Studi Hubungan Internasional. Medan: PT. Yandira Agung.

Steans, J., & Pettiford, L., 2009. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Internet

Hidayati, N., Kita Berada di Kapal yang sama: Presiden SBY Dukung Kampanye Greenpeace. Diakses melalui <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/SBY-dukung-kampanye-Greenpeace/blog/40861/>. Diakses pada Minggu, 15 November 2015.

Hutabarat, S., "Kajian UNFCCC", dalam <http://www.unfccc.go.id/informasi/intanng.cdm.htm>, diakses Pada 07 September 2015

Kaisa. K., 2013, Berbagai Tataran dan Tantangan REDD+, Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, Bogor, Indonesia. Diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1301.pdf pada tanggal 05 September 2015.

Luttrell, C., Loft, L., Gebara, M., F., & Kweka, D., Wacana tentang pembagian manfaat REDD+. Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, Bogor, Indonesia. Diakses dari

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1301.pdf pada tanggal 05 September 2015.

Norway Ministry of Climate and Environment. Sixth Norway's Sixth National Communication. Under the Framework Convention on Climate Change. Hal 6. Diakses Melalui https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/nc6_nor_resubmission.pdf. Diakses tanggal 10 Oktober 2015.

Prasetyo, B., dan Ashariyanto. Perbedaan antara perjanjian dengan MOU. (2013). Terdapat dalam www.hukumonline.com diakses pada 5 juni 2015.

Risnandar., 2015. Deforestasi. Diakses dari < <https://jurnalbumi.com/deforestasi/> pada tanggal 01 September 2015

Streck, Charlotte & Parker, Charlie., 2013, Pendanaan REDD+, Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, Bogor, Indonesia. Diakses dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1301.pdf

UN-REDD Programme, "Global Activities," <http://www.unredd.org/AboutUNREDDProgramme/GlobalActivities/tabid/5957/Default.aspx>. diakses pada 5 Februari 2015.

Dokumen

Aliansi untuk Iklim dan Pemanfaatan Lahan: Ikhtisar Singkat. Climate and Land Use Alliance. Pdf.

Dokumen Pemantauan Hutan Indonesia Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Barnsley, I., Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in

- Developing Countries (REDD): A Guide for Indigenous People.
Karns & Mingst, 2004. International organizations: The Politics and Processes of Global Governance.
- Real-time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) Synthesising Report 2007-2013.
- Ringkasan Eksekutif Greenpeace. Surat Niat Indonesia – Norwegia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan: Kajian Kemajuan dari Greenpeace November 2012. Pdf
- Strategi Daerah REDD+ di Kalimantan Tengah. Laporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013.
- Wibowo., D.,H., LoI Norwegia: Tinjauan (Amanat) Kesejahteraan dan Keadilan.